

PERIMBANGAN KEKUATAN MILITER DI ASIA PASIFIK PASCA PERANG DINGIN

Oleh Dafri Agussalim*

Francis Fukuyama dalam artikelnya yang berjudul "*The End of History*" (1994) berargumen bahwa berakhirnya Perang Dingin dengan sendirinya akan diikuti oleh datangnya perdamaian. Menurutnya, berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri pertentangan ideologi besar dunia, yaitu antara komunisme dan liberalisme. Oleh karena, pertentangan ideologi tersebut merupakan sumber dari konflik dan perang selama ini, maka selepas Perang Dingin perang akan berakhir pula. Menurut Fukuyama, peristiwa tersebut telah menghilangkan alasan bagi bangsa-bangsa di dunia untuk berperang dan mengharamkan penggunaan kekuatan senjata.

Artikel Fukuyama tersebut dipandang oleh banyak komentator dan pengamat sebagai hal yang kontroversial. Beragam reaksi dan tanggapan, baik pro maupun kontra, dilontarkan terhadap argumen Fukuyama tersebut. Salah satu yang bersikap kontra adalah Adrew Mack, seorang profesor ilmu hubungan internasional di Australian Nasional University, Australia. Mack mengakui bahwa berakhirnya Perang Dingin memang, dalam tingkat tertentu, telah membawa angin segar bagi terciptanya perdamaian, misalnya, telah membantu mengurangi ketegangan regional. Hubungan Amerika Serikat dan Rusia menjadi lebih dekat dan bersahabat. Demikian juga hubungan antara Rusia dan RRC, Amerika Serikat dan RRC, Vietnam dan RRC, antara Korea Selatan dan Korea Utara, Jepang dan Rusia dan lain-lain.

* Staf pengajar pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fisipol, Universitas Gadjah Mada.

Akan tetapi, lanjut Mack, hal ini tidak menjadi jaminan bahwa stabilitas dan perdamaian yang diharapkan oleh semua orang akan terwujud dengan mudah. Dalam pandangannya, berakhirnya Perang Dingin telah menyebabkan masalah perdamaian dan keamanan menjadi lebih kompleks dan sulit diprediksi arahnya (Mack, 1994: 147). Pandangan Mack tersebut didasarkan pada pengamatannya terhadap kecenderungan yang terjadi di kawasan Asia Pasifik dalam 5-10 tahun terakhir. Sementara Amerika dan Eropa menurunkan anggaran belanja militernya, di kawasan Asia Pasifik justru naik. Tercatat misalnya anggaran pertahanan RRC, Taiwan, Singapura, Korea Selatan dan Thailand meningkat lebih dari 10 per sen pertahun. Sementara itu, beberapa negara di kawasan itu terus berlomba membeli persenjataan canggih, seperti pesawat tempur F-16, sistem surveillance, pesawat pembom jarak menengah sampai jauh, kapal selam, kapal perang dan rudal-rudal anti pesawat tempur, anti kapal selam. Bahkan di luar Amerika Serikat, RRC dan Rusia, beberapa negara di kawasan ini disinyalir sedang mengembangkan atau telah memiliki senjata nuklir strategis, misalnya India dan Pakistan.

Tulisan ini merupakan asesmen yang bermaksud menjawab sejauhmana kebenaran masing-masing pendapat tersebut, terutama jika dikaitkan dengan realitas yang terjadi di kawasan Asia Pasifik? Benarkah keamanan sudah tercipta dan perlombaan persenjataan sudah berhenti di kawasan ini, atau sebaliknya?

Trend Impor Senjata

Berakhirnya Perang Dingin ternyata tidak serta merta menurunkan kecenderungan pembangunan kekuatan persenjataan di kawasan Asia Pasifik. Hal ini terbukti sejak awal tahun 1980-an sampai dengan awal tahun 1990-an kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan yang melakukan pembangunan sistem persenjataan konvensional modern paling pesat di dunia. Bahkan ketika Perang Dingin berakhir menjelang akhir tahun 1980-an, beberapa negara di kawasan ini terus meningkatkan pembangunan kekuatan militer mereka tanpa begitu terpengaruh oleh peristiwa sangat penting tersebut.

Ada semacam paradok dalam sikap negara-negara di kawasan ini. Di satu sisi berakhirnya Perang Dingin telah membawa relatif perdamaian di kawasan. Kecuali kasus nuklir Korea Utara, kawasan Asia Pasifik secara umum dapat dikatakan relatif bebas dari persoalan-persoalan yang dapat mengancam keamanan secara serius. Satu-satunya masalah keamanan yang cukup serius di luar masalah Korea Utara adalah masalah kepulauan Spratly dan Paracel di lautan Cina Selatan. Akan tetapi skala konflik tersebut sebenarnya masih dalam tarap bisa dikendalikan sehingga kecil kemungkinan meletus menjadi perang terbuka.

Di sisi lain, pada saat yang sama, di kawasan ini juga terjadi peningkatan perlombaan persenjataan yang mengkhawatirkan banyak negara. Data dalam tabel berikut menunjukkan kecenderungan besarnya import senjata yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik antara tahun 1988-1992.

Tabel 1:
Impor Senjata Negara-negara Asia (juta US\$)

Negara	1988	1989	1990	1991	1992	1988-1992
Kamboja	2	193	76	0	0	271
RRC	128	70	116	609	597	1.520
Indonesia	359	265	198	257	97	1.175
Jepang	2.544	2.673	1.915	998	1.095	9.225
Korea Utara	1.382	1.066	636	15	24	3.123
Korea Selatan	1.125	1.114	524	347	414	3.524
Malaysia	15	38	17	32	29	131
Myanmar	0	20	107	257	126	509
Philipina	17	35	22	25	28	127
Singapura	500	72	389	319	38	1.318
Taiwan	368	384	641	561	285	2.234
Thailand	518	536	419	929	869	3.271
Vietnam	6	6	6	0	0	18
Total	6.980	6.487	5.072	4.347	3.602	26.488

Sumber: International Institute For Strategic Studies (IISS), *Strategic Survey* 1993-1994

Dari data pada tabel 1 terlihat bahwa impor senjata yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan secara sepintas terlihat cenderung menurun dari tahun ke tahun, khususnya sejak tahun 1989-1990, bertepatan dengan tahun-tahun berakhirnya Perang Dingin. Beberapa negara, seperti Korea Utara dan Korea Selatan, bahkan menunjukkan penurunan yang cukup tajam, sehingga secara sepintas memberi terkesan kecenderungan meredahnya perlombaan senjata di kawasan.

Benarkah adanya kecenderungan penurunan impor senjata tersebut merupakan cermin adanya penurunan pembangunan senjata oleh negara-negara kawasan? Berdasarkan indikator lainnya, ternyata dugaan tersebut tidak benar. Dilihat dari andil impor yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan atas pangsa impor senjata dunia, maka sebenarnya impor senjata oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik tetap tergolong besar, jauh melampaui impor rata-rata oleh negara-negara di kawasan lain di dunia. Sebagai contoh, dari 15,5 per sen pada tahun 1982 menjadi 34 per sen pada tahun 1992, atau meningkat lebih dari dua kali lipat (SIPRI Yearbook 1992). Sampai dengan tahun 1992, tiga negara di kawasan Asia Pasifik, yaitu Korea Selatan, RRC dan Thailand, merupakan tiga tertinggi dari sepuluh besar negara importir senjata di kawasan dilihat dari besarnya kontrak yang ditandatangani. Sedangkan dua negara lainnya, yaitu Taiwan dan Burma, merupakan negara-negara yang menduduki rangking tertinggi dalam hal nilai impor senjata yang benar-benar telah direalisasikan (Grimmett 1992: 60-72).

Jika dilihat dari aspek senjata konvensional, maka sejak tahun 1992 - 1996, Taiwan, Jepang dan RRC masing-masing merupakan negara pengimpor senjata konvensional terbesar ke 4, 5, 6 di dunia. Disusul oleh Korea Selatan di urutan ke 8, Thailand urutan ke 13, Indonesia urutan ke 17, Kanada urutan ke 19, Australia dan Malaysia masing-masing urutan ke 21 dan 22 (SIPRI 1997: 272). Hal ini membuktikan betapa besarnya jumlah persenjataan yang diimpor oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik pada periode tersebut.

Trend Anggaran Pertahanan

Untuk mengetahui kecenderungan pembangunan kekuatan militer oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik dapat dilihat dari data anggaran pertahanan yang dikeluarkan oleh negara-negara tersebut dalam sepuluh tahun terakhir. Data dalam tabel berikut menunjukkan besarnya anggaran pertahanan negara-negara di kawasan Asia Pasifik antara tahun 1987-1996.

Tabel 2.
Anggaran Pertahanan
Beberapa Negara di Kawasan Asia Pasifik (Juta US \$)

Negara	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Amerika Serikat	331.215	323.860	320.427	305.170	268.994	264.116	269.111	254.038	238.176	226.369
Kanada	11.488	11.631	11.536	11.547	10.413	10.482	10.433	10.191	9.549	8.817
Jepang	26.123	27.572	28.773	28.524	28.950	29.644	29.982	30.135	30.428	31.028
RRC	6.363	5.558	5.410	6.063	6.866	7.184	7.063	7.505	7.487	8.162
Taiwan	6.045	6.430	7.213	7.782	8.086	8.154	8.444	8.172	8.134	8.101
Korsel	8.139	8.624	9.238	9.603	10.393	10.779	10.654	11.531	12.133	12.765
Korut	5.230	2.361	2.060	2.193	2.431	3.002	2.543	2.331	3.122	1.223
Vietnam				781	552	408	301	393		
Indonesia	1.604	1.629	1.788	1.943	2.068	2.206	2.495	2.844	2.706	2.674
Malaysia	1.445	874	1.048	1.125	1.531	1.522	1.617	1.690	1.821	2.101
Philippina	584	785	747	605	551	555	595	631	697	698
Singapura	1.280	1.411	1.560	1.743	1.782	1.921	1.961	2.035	2.540	2.718
Australia	6.830	6.611	6.594	6.627	6.742	7.174	7.390	7.237	6.735	5.423
Selandia Baru	835	894	849	776	704	632	632	625	710	718

Sumber: diolah dari SIPRI Yearbook 1997

Dari data di atas diketahui sejak pertengahan 1980-an sampai pertengahan 1990-an terjadi peningkatan anggaran belanja pertahanan yang pesat di kawasan. Kecuali anggaran belanja negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet dan Kanada yang menurun secara moderat, anggaran belanja pertahanan negara-negara di kawasan meningkat lebih kurang dua kali lipat dari seluruh anggaran belanja militer negara-negara Asia dalam dekade terakhir. Bahkan anggaran pertahanan Asia Timur dan Australasia meningkat tajam, dari lebih kurang 105 miliar dolar Amerika pada 1992 menjadi 130 miliar dolar pada tahun 1995, atau sama dengan seluruh jumlah anggaran pertahanan negara-negara Eropa (minus negara-negara bekas Uni Soviet) pada periode yang sama. Antara tahun 1985 - 1992, tercatat anggaran belanja pertahanan RRC, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Taiwan dan Thailand berturut-turut mengalami peningkatan sebesar: 12,6%, 28,5%, 22,4%, 63,5%, 31,2%, 36,2%, 29,9%, dan 27,6% (IISS 1994; 44). Angka presentase peningkatan tersebut termasuk sangat tinggi, terutama jika dibandingkan dengan anggaran belanja pertahanan negara-negara Barat yang cenderung turun.

Pergeseran Kebijakan

Munculnya dua gejala yang terlihat saling bertentangan: di satu sisi impor senjata menunjukkan kecenderungan menurun, namun di sisi lain pada saat yang sama terjadi peningkatan anggaran pertahanan dari negara-negara kawasan mengindikasikan dua hal. *Pertama*, telah terjadi pengalihan kebijakan pembangunan persenjataan; dari titik berat bertumpuh pada pembelian senjata siap pakai (impor) ke strategi lokalisasi produksi persenjataan. Dengan kata lain telah terjadi upaya peningkatan produksi persenjataan secara mandiri di dalam negeri masing-masing negara di kawasan. Pembangunan persenjataan secara mandiri tersebut bisa berarti benar-benar melakukan riset dan memproduksi senjata murni hasil sendiri atau melalui sistem lisensi.

Dugaan tersebut terbukti dari semakin banyaknya negara-negara di kawasan yang memproduksi senjata sendiri. Taiwan dan Jepang, misalnya, memproduksi pesawat-pesawat tempur sejenis F-16 atas lesensi dari Amerika Serikat. Indonesia memproduksi pesawat terbang atas lesensi Jerman dan senjata ringan sejenis M-16 juga atas lesensi dari Amerika Serikat. Hal yang sama juga dilakukan oleh Korea Selatan, Australia dan beberapa negara lainnya.

Sedangkan RRC sebagai negara yang memang termasuk produsen senjata penting di kawasan, dan bahkan dunia, tidak terlalu tergantung terhadap impor dari pihak asing, baik negara-negara Barat maupun dari negara-negara Timur (Rusia dan negara-negara di Eropa Timur lainnya). Ini artinya adanya penurunan dalam angka impor senjata oleh RRC bukan berarti negara tersebut tidak melakukan pembangunan kekuatan militernya, tetapi justru dapat berarti sebaliknya.

Kedua, kemungkinan besar telah terjadi pengalihan fokus perhatian negara-negara di kawasan dari penekanan terhadap kuantitas kepada peningkatan kualitas dari senjata yang dibeli atau yang dimilikinya. Sehingga, walaupun dari sudut besarnya impor senjata terlihat menurun, tetapi dari sudut anggaran pengeluaran untuk pembelian persenjataan terus meningkat. Hal ini dapat dimengerti karena setiap peningkatan kemampuan teknologi dari senjata-senjata yang ada atau yang akan dibeli memerlukan dana yang sangat besar. Pembelian terhadap satu pesawat tempur secanggih F-16 buatan Amerika Serikat, misalnya, jauh lebih mahal dibanding pembelian pesawat tempur jenis

Sky-Hawke buatan Inggris atau Mig-21 buatan Rusia. Begitu juga memproduksi persenjataan sendiri akan jauh lebih mahal mengingat investasi untuk membuat pabrik senjata tersebut - termasuk melakukan research dan pengembangannya - sangat mahal. Apalagi mengingat minimnya kemampuan teknologi dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing negara di kawasan.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa sesungguhnya data di atas bukan saja tidak menyanggah argumen bahwa perlombaan senjata di kawasan belum berhenti, tetapi juga telah mempertegas kenyataan bahwa perlombaan senjata di kawasan terus berlangsung sejak berakhirnya Perang Dingin, dan sampai sekarang tampaknya belum juga mereda.

Kekuatan Riil Dewasa Ini

Data yang telah disajikan di atas belum dapat memberikan gambaran yang nyata mengenai perimbangan kekuatan militer di kawasan Asia Pasifik dewasa ini. Data-data tersebut harus diinterpretasikan hanya sebagai trend atau kecenderungan perkembangan pembangunan militer di kawasan. Dengan kata lain, adanya rencana pembangunan kekuatan persenjataan yang tercermin dari besarnya impor dan anggaran pertahanan tidak dapat menjelaskan secara seksama kekuatan yang sebenarnya dimiliki oleh masing-masing negara. Ada perbedaan antara rencana pembangunan kekuatan persenjataan dan realisasinya atau kenyataan yang benar-benar dimiliki oleh suatu negara. Apalagi jika hal tersebut dikaitkan dengan spesifikasi teknis, seperti kuantitas dan kualitas dari persenjataannya. Misalnya jenis senjata apa saja yang dimiliki, berapa besar kemampuan daya hancurnya, daya jelajah, dan daya tahan dan masing-masing senjata yang dimiliki.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur kekuatan militer suatu negara adalah jumlah personel militer yang dimiliki oleh negara tersebut. Dalam konteks perang konvensional, semakin besar jumlah personel militer yang dimiliki semakin besar pula kekuatan militer dari negara yang bersangkutan. Tabel berikut memuat data besarnya jumlah personel militer beberapa negara di kawasan Asia Pasifik tahun 1997.

Tabel 3.
Jumlah Personil Militer
Negara-Negara Kawasan Asia Pasifik 1997

Negara	Jumlah Personil Militer		Cadangan 1997	Para-Militer 1997
	1985	1997		
Amerika Serikat	2.151.600	1.447.600	1.711.700	85.700
Kanada	83.000	81.600	28.700	11.100
Australia	70.400	57.400	33.700	1.000
Brunei	4.100	5.000	700	4
Kamboja	35.000	140.500	-	220.000
RRC	3.900.000	2.840.000	1.200.000	800.000
Indonesia	278.100	284.000	400.000	200.000
Jepang	243.000	235.600	46.700	12.000
Korea Utara	838.000	1.055.000	4.700.000	189.000
Korea Selatan	598.000	672.000	4.500.000	4.500
Malaysia	110.000	111.500	37.800	20.100
Myanmar	186.000	429.000	-	85.300
Selandia Baru	12.400	9.600	7.000	-
Philipina	114.800	110.500	131.000	42.500
Singapura	55.000	70.000	263.800	108.000
Taiwan	444.000	376.000	1.657.500	26.700
Thailand	235.300	266.000	200.000	71.000

Sumber: Diolah dari SIPRI Yearbook 1998: *Military Balance 1998/1999*

Data dalam tabel di atas di samping memperlihatkan besarnya kekuatan militer di kawasan, juga memperlihatkan perimbangan kekuatan di antara negara-negara di kawasan dewasa ini. Dilihat dari aspek jumlah personel militer yang dimiliki, dapat ditarik kesimpulan bahwa posisi sebagai tiga besar kekuatan militer utama di kawasan masih di pegang, secara berurutan, oleh RRC, Amerika Serikat dan Korea Utara. Selanjutnya sepuluh besar kekuatan yang lain masing-masing, secara berurutan, diduduki oleh Korea Selatan, Vietnam, Myanmar, Taiwan, Indonesia, Thailand, Jepang, Kamboja, Malaysia dan Philipina.

Jika kita perhatikan secara seksama, selisih jumlah personel yang dimiliki oleh masing-masing negara tersebut ternyata sangat tinggi. Khususnya jika personel militer Amerika Serikat, RRC, Korea Utara dan Korea Selatan dibandingkan dengan personel militer negara-negara lainnya. Dilihat dari sisi ini berarti telah terjadi ketidakseimbangan (*imbalance*) dalam kekuatan militer di kawasan.

Hal lain yang perlu diperhatikan dari data di atas adalah bahwa hampir semua negara-negara yang termasuk sepuluh besar yang memiliki jumlah personil militer paling banyak adalah negara-negara yang sedang terlibat dalam satu atau lebih konflik di kawasan RRC, misalnya, sedang mengalami konflik dengan Taiwan, Jepang dan beberapa negara-negara lain di ASEAN mengenai kepulauan Paracel dan Spratly di laut Cina Selatan.

Dua negara lainnya, Korea Utara dan Korea Selatan, yang sama-sama memiliki jumlah personil militer yang sangat besar, juga sedang mengalami konflik yang sangat intens satu sama lainnya. Demikian pula halnya dengan negara-negara lain di ASEAN, Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar dan Vietnam, semuanya sedang menghadapi konflik, kalau tidak dengan pihak asing (eksternal) konflik tersebut minimal bersifat domestik.

Dari data di atas juga dapat diketahui bahwa umumnya jumlah personil militer sebagian besar negara-negara di kawasan cenderung terus bertambah atau meningkat. Bahkan jumlah personil militer Korea Utara, Korea Selatan, Kamboja dan Myanmar meningkat secara drastis. Khusus untuk Kamboja dan Myanmar peningkatan tersebut mencapai lima kali lipat sejak tahun 1985. Sementara itu, walaupun tidak sebesar negara-negara tersebut, jumlah personil negara-negara lainnya seperti Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia dan Brunei mengalami peningkatan yang cukup berarti pula.

Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, Vietnam, Taiwan, Philipina, Jepang dan RRC termasuk pengecualian, karena secara statistik jumlah personil militernya menunjukkan kecenderungan menurun. Walaupun demikian, dilihat dari aspek nilai militer, maka penurunan tersebut belum cukup berarti, sebab jumlah personil militer negara-negara tersebut masih tetap sangat besar jumlahnya. Total jumlah pasukan RRC dan Amerika Serikat, dan Korea Utara, misalnya, masih berada di atas angka empat juta orang. Jumlah personil militer yang demikian besar tersebut belum termasuk pasukan cadangan masing-masing yang juga mencapai total lebih kurang tiga juta orang.

Di samping itu, harus diingat pula bahwa dalam kasus RRC, pengurangan jumlah personil tersebut tidak berarti mengurangi kekuatan militer negara itu karena langkah tersebut diambil bersamaan dengan upaya peningkatan kualitas dari personil yang ada. Demikian juga dengan Amerika Serikat, karena pasukan negara tersebut terkenal sangat tinggi kualitasnya serta dilengkapi dengan peralatan dan persenjataan yang canggih.

Kekuatan Persenjataan

Walaupun jumlah personil militer diyakini merupakan faktor penting dari kekuatan militer, tetapi harus diingat bahwa hal itu hanya merupakan salah satu saja dari indikator kekuatan militer suatu negara. Dalam konteks perang modern kadang-kadang jumlah personil yang banyak tidak selalu penting, asalkan didukung oleh peralatan perang atau persenjataan yang canggih atau lebih unggul dari lawan. Sehingga diabad modern ini sering sekali indikator utama kekuatan militer suatu negara bukan dilihat dari jumlah personil militer yang dimilikinya, tetapi pada keunggulan peralatan atau persenjataannya. Sebagai contoh, walaupun RRC mempunyai jumlah personil militer jauh lebih banyak dari AS, namun AS jauh lebih kuat dibanding RRC karena kualitas persenjataan AS yang lebih canggih dari milik RRC, baik persenjataan konvensional maupun persenjataan nuklir. Data dalam tabel berikut ini akan memuat garis besar kekuatan persenjataan utama negara-negara di kawasan.

Tabel 4.
Perbandingan Kekuatan Militer
Beberapa Negara di Kawasan Asia Pasifik 1997

Negara	Kapal Selam	Tank Tempur	Pesawat Tempur	Kapal Perang Utama	Mlsi Nuklir
Amerika Serikat	64	-	284	121	ratusan
Rusia	86	9.800	1.320	54	ratusan
Jepang	17	2.170	564	64	tidak ada
RRC	63	8.800	5.850	54	puluhan
Taiwan	4	719	529	36	tidak ada
Korea Selatan	14	1.800	488	38	tidak ada
Korea Utara	26	3.000	732	3	ada (perk)
Vietnam	2	1.300	201	7	tidak ada
Thailand	-	671	206	15	tidak ada
Indonesia	4	1.223	91	57	tidak ada
Malaysia	-	1.201	89	6	tidak ada
Philipina	-	581	39	1	tidak ada
Singapura	1	454	58	-	tidak ada
Australia	4	671	126	11	tidak ada

Sumber:

Diola dari berbagai sumber; SIPRI Yearbook 1997, IISS, *Military Balance*, 1998/1999

Data di atas sekali lagi memperlihatkan betapa besarnya kekuatan militer yang telah berhasil dibangun oleh negara-negara di kawasan. Sebagaimana halnya dilihat dari aspek jumlah personil militer, maka jika dilihat dari jumlah persenjataan utama yang dimiliki oleh masing-masing negara, Amerika Serikat, RRC dan Korea Utara masih tetap merupakan tiga besar kekuatan militer utama di kawasan. Di susul kemudian oleh sepuluh besar kekuatan lainnya masing-masing, secara berurutan, Rusia, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand, Australia, dan Philipina.

Perlu diingat, bahwa peringkat di atas merupakan hasil dari analisis kuantitatif dari senjata yang dimiliki oleh masing-masing negara. Jika peringkat tersebut dilakukan dengan cara analisis kualitatif dari persenjataan yang dimiliki, maka kemungkinan besar peringkat tersebut akan berubah, khususnya bagi negara-negara yang sumber persenjataannya berbeda. Misalnya walaupun Korea Utara secara faktual memiliki senjata utama lebih banyak dibanding Korea Selatan, tetapi belum tentu kekuatan atau kemampuan militer Korea Selatan berada di belakang kekuatan militer Korea Utara. Hal ini mengingat tingkat kemajuan teknologi persenjataan Korea Selatan, yang umumnya berasal dari Amerika Serikat, diyakini jauh lebih canggih dibanding teknologi persenjataan Korea Utara, yang umumnya berasal dari bekas Uni Soviet. Demikian juga halnya dengan kekuatan militer Australia, belum tentu berada di bawah kekuatan militer Indonesia dan seterusnya.

Di samping itu, selain memiliki senjata-senjata utama, negara-negara tersebut juga masih memiliki senjata-senjata lainnya yang perannya dalam kemampuan militer secara keseluruhan juga tidak kecil. Misalnya, helikopter, misil anti pesawat, rudal anti kapal selam, artileri, pesawat pengangkut personil, bahan bakar dan logistik lainnya, serta yang paling penting, sarana dan prasarana C3I (komunikasi, komando, kontrol dan intelijen).

Program Terakhir

Jumlah dan kualitas personil militer dan persenjataan yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan Asia Pasifik seperti terlihat pada tabel 3 dan 4 di atas diperkirakan telah meningkat pesat dalam dua tahun terakhir. Hal ini dapat diketahui dari adanya peningkatan yang cukup tajam anggaran pertahanan beberapa negara tertentu di kawasan sejak tahun 1997. Pada tahun fiskal 1997/

1998, misalnya, pemerintah Australia menganggarkan sebesar 6,8 miliar dolar Amerika untuk pertahanannya, atau hampir sama besarnya dengan anggaran pertahanan RRC pada tahun yang sama. Dengan jumlah tersebut berarti anggaran pertahanan Australia meningkat sebesar 260 juta dolar Amerika dibanding anggaran pertahanan tahun fiskal sebelumnya (1996/1997).

Anggaran sebesar itu dimanfaatkan untuk membuat atau membeli persenjataan baru atau memperbaiki dan meningkatkan kemampuan persenjataan yang sudah ada. Termasuk pembelian kapal frigate baru, pesawat logistik dan transportasi C-130J, pembuatan kapal selam kelas Collins, kapal pemburu pantai, peningkatan kemampuan kapal pengintai, pembelian wahana artileri ringan dan perbaikan dan peningkatan kemampuan jaringan radar.

Selain itu pemerintah Australia juga melakukan perbaikan terhadap kapal-kapal frigate yang ia miliki, memperkokoh piranti elektronik untuk sistem rudalnya, memperkuat kemampuan pengintaian dan intelijen, meningkatkan kemampuan komunikasi serta memperbesar daya serang dari skuadron F-111 yang dimilikinya (JCIE 1998: 25).

Sebagaimana halnya Australia, anggaran pertahanan RRC juga meningkat tajam pada tahun fiskal yang sama. Menurut laporan yang disampaikan komisi anggaran Kongres RRC, negara ini mengalokasikan dana sebesar 9,7 miliar dolar Amerika untuk pembangunan pertahanannya, atau meningkat sebesar 12,7 per sen dari anggaran pertahanan tahun fiskal sebelumnya (1996/1997). Anggaran tersebut digunakan pemerintah RRC untuk memodernisasi dan mereformasi tentara pembebasan rakyat (People's Liberation Army-PLA), meningkatkan kemampuan senjata yang dimilikinya, khususnya kemampuan teknologinya serta melakukan research militer yang lebih intensif (JCIE 1998: 46).

Dalam hal personil militer, pemerintah RRC memang terus menciutkan jumlah tentara aktifnya. Mulai tahun 1997 sampai tahun 2000, RRC telah memotong jumlah personil militernya sebesar 500.000. Kebijakan ini berkaitan dengan upaya RRC untuk memiliki jumlah personil yang relatif ramping tetapi memiliki kualitas yang handal. Jadi pemotongan jumlah personil militer tersebut tidak berarti mengurangi kekuatan militer RRC, bahkan karena diikuti dengan peningkatan kualitas SDM dan peralatan perangnya, kebijakan tersebut diperkirakan justru telah meningkatkan efisiensi dan kemampuan militer RRC secara keseluruhan.

Seperti halnya Australia dan RRC, anggaran pertahanan Jepang untuk tahun fiskal 1997/1998 juga meningkat cukup signifikan. Pada tahun anggaran tersebut Jepang mengalokasikan dana sebesar 38 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat 2,1 per sen dari anggaran tahun sebelumnya. Anggaran tersebut digunakan untuk pembelian beberapa peralatan perang baru seperti 18 buah tank type-90, 3 peluncur roket, 10 artileri, 9 sistem roket multi luncur, 27 helikopter berbagai tipe, 2 kapal perang penghancur (destroyer), 1 kapal selam, beberapa pesawat latih dan rescue JCIE 1998: 70). Selain itu dana tersebut juga digunakan untuk pengembangan Pasukan Bela Diri (Self-Defense Force-SDF), pemeliharaan peralatan dan fasilitas militer, dukungan bagi pangkalan dan fasilitas militer AS di Okinawa dan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan persenjataan.

Sementara itu, walaupun pada waktu itu sedang menghadapi krisis ekonomi yang cukup parah, Korea Selatan juga terus meningkatkan anggaran pertahanannya. Hal ini berkaitan erat dengan adanya ketegangan negara itu dengan Korea Utara. Untuk tahun fiskal 1997/1998 Korea Selatan mengalokasikan dana sebesar 8,5 miliar dolar Amerika. Sebagian besar dari anggaran tersebut digunakan untuk kepentingan pemeliharaan peralatan, personel dan fasilitas militer lainnya. Selebihnya digunakan untuk peningkatan kemampuan pertahanannya. Termasuk pembelian sistem pengintai dan peringatan dini AWACS, beberapa helikopter serta beberapa jenis senjata lainnya.

Sama halnya dengan Korea Selatan, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN pada tahun fiskal 1997/1998 juga meningkatkan anggaran pertahanannya. Indonesia, misalnya, walaupun termasuk terkecil peningkatannya di kawasan, mengalokasikan dananya untuk kepentingan pertahanannya sebesar 2,3 miliar dolar Amerika Serikat. Sebagian dana tersebut digunakan untuk pengeluaran rutin angkatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI dan polisi) dan memelihara peralatan dan fasilitas militer yang ada. Sebagian lagi dimanfaatkan untuk pengembangan dan penambahan peralatan baru, termasuk pembelian beberapa pesawat tempur Sukhoi dari Rusia, yang kemudian ditunda atau dibatalkan karena adanya krisis ekonomi.

Philipina, sementara itu, menganggarkan 14,2 miliar dolar Amerika untuk kepentingan modernisasi angkatan bersenjata selama lima tahun sejak 1997. Termasuk dalam program ini adalah pembelian beberapa pesawat tempur

jenis F-5, kapal patroli pantai, kapal pengintai, beberapa peluncur roket, dan kapal-kapal penyerang cepat lainnya.

Selanjutnya, walaupun menurun dibanding tahun sebelumnya, Singapura mengalokasikan dana pertahanannya sebesar 3,7 miliar dolar Amerika untuk tahun fiskal 1997/1998. Disamping untuk keperluan rutin, anggaran tersebut digunakan untuk memodernisasi persenjataannya. Termasuk di dalamnya adalah pembelian kapal selam baru dari Swedia, modernisasi terhadap Tank AMX-13 dan memproduksi tank tempur sendiri.

Di antara negara ASEAN, Thailand merupakan negara yang paling agresif dalam membangun sistem pertahanannya. Pada tahun 1997 misalnya negara ini memprogramkan untuk membeli berbagai macam senjata canggih. Termasuk pembelian misil udara ke udara (AMRAAM), dua kapal selam baru, sistem satelit, 8 buah pesawat tempur F/A-18, 290 kendaraan tempur, 200 tank tempur serta ribuan senjata ringan lainnya seperti M-16 dari Amerika. Bahkan dewasa ini angkatan perang Thailand telah dilengkapi oleh kapal pengangkut pesawat, satu-satunya negara yang memiliki kapal sejenis di Asia Tenggara.

Faktor Penyebab

Mengapa negara-negara di kawasan Asia Pasifik terus terlibat dalam perlombaan persenjataan sementara berakhirnya Perang Dingin telah membawa relatif perdamaian bagi mereka? Tidak mudah menjawab pertanyaan di atas. Hal ini dikarenakan penyebabnya tidak bersifat tunggal, melainkan jamak dan sangat kompleks. Sebagian berkaitan dengan militer sebagian lagi bersifat non-militer. Suatu negara mungkin didorong oleh beberapa alasan secara bersamaan, negara lain mungkin hanya didorong oleh kombinasi dari beberapa faktor saja. Walaupun demikian ada beberapa faktor yang disinyalir dapat menjadi pendorong peningkatan perlombaan senjata di kawasan.

Pertama, meningkatnya kemampuan ekonomi. Secara teoritik, hanya negara yang memiliki kemampuan ekonomi yang kuatlah yang dapat membangun pertahanannya dengan baik. Untuk membeli, memelihara dan menggunakan peralatan persenjataan dibutuhkan biaya yang sangat banyak

mengingat harganya yang demikian mahal. Semakin besar jumlah dan semakin canggih senjata yang diperlukan semakin besar pula biaya yang diperlukan oleh suatu negara. Oleh karena itu, sulit dibayangkan negara-negara miskin akan dapat membangun pertahanannya dengan baik. Dengan kata lain, peningkatan anggaran belanja suatu negara mempunyai hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonominya.

Dari beberapa penelitian di negara-negara ASEAN, misalnya, diketahui bahwa sejak tahun 1960-an sampai dengan akhir 1980-an secara konsisten peningkatan anggaran pertahanan negara-negara tersebut berjalan paralel dengan pertumbuhan ekonomi mereka (lihat, misalnya, Harris 1986: 41-49 dan Denoon 1987: 48-71). Negara-negara yang memiliki tingkat pertumbuhan GNP tertinggi seperti Singapura dan Malaysia terbukti mengalami peningkatan pertumbuhan anggaran pertahanan yang tertinggi. Sedangkan negara-negara ASEAN lainnya yang memiliki tingkat pertumbuhan GNP yang relatif lebih rendah seperti Indonesia dan Philipina, ternyata mengalami peningkatan anggaran pertahanan yang lebih rendah pula.

Walaupun demikian, adanya hubungan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan anggaran pertahanan tersebut tidak berarti bahwa proporsi dari anggaran pertahanan negara-negara tersebut, dilihat dari GNP, meningkat pula. Dalam kenyataannya, ada kecenderungan bahwa tingkat pertumbuhan anggaran pertahanan negara-negara di kawasan relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan GNPnya. Dengan kata lain, presentase anggaran pertahanan negara-negara tersebut terhadap GNPnya cenderung turun dalam satu dekade terakhir. Sebagai contoh, anggaran pertahanan Indonesia turun dari 3 per sen pada tahun 1981 menjadi 1,6 per sen dari GNPnya pada tahun 1991. Pada saat yang sama anggaran pertahanan Malaysia juga turun dari 5,8 per sen pada tahun 1981 menjadi 3,4 per sen dari GNPnya pada tahun 1991. Demikian juga halnya dengan anggaran pertahanan Thailand turun dari 3,8 per sen pada tahun 1981 menjadi 2,6 per sen dari GNPnya pada tahun 1991. Hanya anggaran pertahanan Singapura yang relatif konstan, berkisar antara 5-6 per sen dari GNPnya (Ball, 1994: 133).

Perlu dipahami bahwa dorongan untuk membangun kekuatan persenjataan tersebut berkaitan pula dengan prestise negara yang bersangkutan di kawasan dan dunia internasional. Memiliki senjata yang tangguh, baik secara kuantitas

maupun kualitas, merupakan prestise tersendiri di kalangan para pemimpin negara-negara di Asia Pasifik. Dengan prestise tersebut negara itu akhirnya berharap akan dapat memperoleh *political leverage* di panggung internasional. Misalnya menjadi aktor atau pemain yang diperhitungkan dalam setiap masalah di kawasan atau bahkan di dunia.

Kedua, melemahnya kehadiran AS di kawasan. Sejak berakhirnya Perang Vietnam AS telah mengindikasikan pengurangan kehadiran kekuatan militernya di kawasan. Penarikan fasilitas militer dan pasukan AS dari teluk Subik dan Clark di Philipina, walaupun sebagian telah ditempatkan kembali di Singapura, Jepang dan Hawaii, telah mengurangi lebih dari 20 per sen kekuatan militer AS di kawasan. Termasuk di dalamnya juga pengurangan terhadap satu kapal induk dan beberapa skuadron pesawat tempur (lebih kurang 15 per sen dari kekuatan udara AS di Pasifik), serta beberapa puluh ribu personel militer dari Jepang dan Korea Selatan (lihat US Joint Chiefs of Staff 1992: Sec.8, hal. 7).

Walaupun sebenarnya penarikan pasukan AS tersebut masih kecil jika dibandingkan dengan penarikan pasukannya dari Eropa dan dari penarikan pasukan bekas Uni Soviet dari Eropa Timur, namun kebijaksanaan AS tersebut telah menimbulkan pertanyaan dan kekhawatiran besar di kalangan para pemimpin dan pengamat militer di kawasan. Mereka umumnya melihat bahwa kebijaksanaan AS tersebut mengindikasikan mulai berkurangnya perhatian politik AS terhadap negara-negara di kawasan.

Lebih dari itu, berkurangnya kehadiran kekuatan AS tersebut berarti memberi peluang pada kekuatan lain untuk menancapkan pengaruh dan hegemoninya di kawasan. Hal ini pada akhirnya dikhawatirkan akan menimbulkan ancaman baru terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Beberapa negara kecil, misalnya, sangat mengkhawatirkan penarikan pasukan AS dari kawasan akan mendorong peningkatan kompetisi antara negara-negara kekuatan utama regional untuk saling memperluas pengaruhnya masing-masing.

Kekhawatiran tersebut bukannya tidak beralasan. Sejak berakhirnya Perang Dingin terjadi peningkatan kekuatan militer yang sangat signifikan oleh Jepang, RRC dan juga India. Jepang, misalnya, sejak pertengahan 1980-an sampai saat ini terus meningkatkan kekuatan lautnya. Dewasa ini dapat dikatakan ia merupakan salah satu negara yang berhasil memiliki kekuatan laut yang paling modern di kawasan, termasuk memiliki lebih dari 100 buah pesawat tempur angkatan laut, 64 kapal perang (frigate dan destroyer) serta 14 kapal selam.

Di samping itu Jepang juga sedang membangun beberapa kapal penghancur baru yang dilengkapi dengan sistem persenjataan yang lebih canggih, memodernisasi kapal selamnya, membeli kapal tangker baru yang memiliki daya jangkau lebih jauh, serta pembelian beberapa pesawat tempur baru lainnya dari AS. Jepang juga telah mulai memperluas wilayah operasi maritimnya mencapai lebih dari 1000 mil laut, atau hampir mencapai Philipina ke selatan.

Pembangunan kekuatan militer oleh Jepang tersebut mendapat perhatian yang cermat dan reaksi dari beberapa negara lain, khususnya RRC, Taiwan, Korea Selatan dan negara-negara anggota ASEAN. Akibatnya, negara-negara tersebut pada akhirnya juga terdorong untuk membangun persenjataannya. RRC, misalnya, merupakan negara yang paling giat meningkatkan kemampuan persenjataannya. Di samping membeli kapal-kapal perang dan pesawat-pesawat tempur baru, RRC juga aktif meningkatkan kemampuan persenjataan yang sudah ada serta membangun sarana dan prasarana militer di berbagai tempat, termasuk membangun pangkalan udara di kepulauan Paracel.

Pembangunan kekuatan persenjataan yang dilakukan RRC tersebut pada gilirannya menimbulkan kekhawatiran negara-negara lain di kawasan, khususnya Taiwan, Korea Selatan, Jepang dan negara-negara anggota ASEAN. Dengan kekuatan militer yang dimilikinya tersebut dikhawatirkan RRC akan menancapkan supremasinya di kawasan. Taiwan, misalnya, merasa khawatir peningkatan pembangunan kekuatan militer yang dilakukan oleh RRC tersebut akan mendorong negara itu untuk menyerang atau menekan Taiwan dengan cara yang disebut *gun boat diplomacy*. Apalagi dalam satu dekade terakhir hubungan kedua negara selalu diwarnai ketegangan.

Hal yang sama juga dirasakan oleh negara-negara ASEAN. Kebijakan RRC tersebut dapat mendorong reaksi balik dari negara-negara tetangga lain seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, India dan negara-negara ASEAN. Jika ini terjadi, maka berarti akan terjadi perlombaan senjata baru yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas dan keamanan kawasan.

Jadi ringkasnya, peningkatan pembangunan kekuatan pertahanan di kawasan berkorelasi positif dengan aksi-reaksi terhadap upaya suatu negara kawasan untuk menutupi kekosongan kekuatan akibat melemahnya kehadiran pasukan AS di kawasan.

Ketiga, respon terhadap konflik di kawasan. Berakhirnya Perang Dingin ternyata tidak dengan sendirinya menghilangkan konflik-konflik regional, melainkan untuk batas tertentu justru telah menyebabkan ketegangan dan konflik regional tersebut kehilangan kontrol (Robinson 1997: 137) sehingga konflik-konflik tersebut bukan saja sampai saat ini belum tuntas tetapi bahkan cenderung meningkat.

Di kawasan Asia Pasifik, khususnya di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara, terdapat berbagai konflik atau potensi konflik yang dapat berkembang menjadi konflik fisik atau perang terbuka. Konflik atau potensi konflik tersebut beragam mulai dari masalah klaim kedaulatan antar negara, masalah legitimasi pemerintahan, perselisihan perbatasan dan lain-lain.

Sebagai misal adalah konflik antara RRC dan Taiwan, Jepang dan Korea Selatan, Jepang dan RRC mengenai pulau Sinkaku, Korea Selatan dan Korea Utara, konflik atas klaim beberapa negara di kawasan kepulauan Spratly dan Paracel, konflik antara Philipina dan Malaysia mengenai Sabah, antara Indonesia dan Malaysia mengenai pulau Ligitan dan Sipadan, Malaysia dan Singapura mengenai pulau Batu Putih, masalah dalam negeri Kamboja, masalah Timor Timur dan Irian Jaya di Indonesia, dan berbagai konflik lainnya.

Sebagian besar dari konflik atau potensi konflik tersebut kemungkinan memang tidak akan berkembang menjadi konflik antar negara. Sebagian dari masalah tersebut terlihat berangsur-angsur dapat diselesaikan secara damai. Sebagian lagi dapat dikontrol oleh masing-masing pihak yang bertikai sehingga tidak berkembang menjadi konflik terbuka. Misalnya konflik antara Philipina dan Malaysia mengenai klaim atas Sabah. Selebihnya masalah-masalah tersebut berhasil ditekan hanya sebatas menjadi masalah domestik atau internal dari masing-masing negara, seperti misalnya masalah Aceh dan Irian Jaya di Indonesia.

Walaupun demikian, sulit dibantah bahwa semua masalah tersebut tetap saja menjadi sumber kesalahpahaman, kecurigaan dan ketegangan antar negara-negara di kawasan. Setidaknya masalah-masalah tersebut telah menyebabkan tersitanya perhatian para pemimpin negara-negara tersebut. Sikap dan pandangan semacam itu pada akhirnya mempengaruhi tindakan mereka dalam meningkatkan pembangunan kekuatan militernya.

Keempat, kepentingan keamanan ekonomi. Sebagaimana halnya yang terjadi di negara-negara lainnya di seluruh dunia, kepentingan keamanan negara-negara kawasan Asia Pasifik dalam lebih kurang dua dekade terakhir meluas, tidak lagi hanya terbatas pada keamanan militer tetapi juga meliputi keamanan ekonomi. Bahkan dalam batas tertentu kepentingan keamanan ekonomi akhir-akhir ini telah ditempatkan pada posisi yang paling penting (prioritas utama) menggeser keamanan militer.

Keamanan ekonomi (*economic security*) ini tidak hanya meliputi pengamanan terhadap akses ke pasar, jalur-jalur ke sumber-sumber bahan mentah, tetapi juga meliputi pengamanan sumber-sumber alam yang dimiliki seperti wilayah perikanan dan sumber-sumber kekayaan laut lainnya. Negara-negara yang hidupnya sangat tergantung dari suplai bahan-bahan mentah dari negara-negara lain seperti Jepang, misalnya, akan berusaha sekuat tenaga untuk mengamankan jalur-jalur suplai bahan mentah tersebut. Sedangkan negara-negara yang memiliki sumber-sumber daya alam yang sangat penting dan dibutuhkan oleh seluruh negara-negara di dunia, akan dengan sekuat tenaga juga untuk menjaga keamanan sumber-sumber tersebut dari pencurian, penyelundupan dan perampasan oleh pihak asing.

Untuk maksud tersebut maka beberapa negara-negara di kawasan seperti Jepang, Singapura, Malaysia, Indonesia, RRC, Thailand dan Philipina didorong untuk membangun persenjataan yang diperlukan untuk pengamanan kepentingan ekonomi mereka. Dengan diakuinya 200 mil Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh PBB, maka Indonesia dan Malaysia, misalnya, aktif membangun persenjataan angkatan lautnya untuk mengamankan wilayah ZEE mereka masing-masing. Indonesia, misalnya, dalam sepuluh tahun terakhir giat meningkatkan kemampuan lautnya, dengan membeli beberapa kapal perang bekas Jerman Timur, sistem surveillance dari Perancis dan pesawat pengintai Nomad dari Australia. Hal yang sama juga dilakukan oleh Malaysia.

Kelima, tekanan supply-side dan korupsi. Berakhirnya Perang Dingin telah mengurangi ketegangan antar kubu barat dan timur. Berkurangnya ketegangan kedua kekuatan tersebut pada gilirannya telah menurunkan perlombaan senjata diantara keduanya. Anggaran belanja pertahanan AS, negara-negara Barat dan bekas Uni Soviet terlihat menurun cukup tajam sejak berakhirnya Perang Dingin. Efek dari kombinasi berakhirnya Perang Dingin dan menurunnya

anggaran belanja negara-negara produsen senjata utama dunia tersebut adalah melemahnya pasar persenjataan di dalam negeri masing-masing negara itu. Pemerintah masing-masing negara tersebut tidak lagi mampu atau mau membeli semua produk senjata yang telah dihasilkan oleh perusahaan persenjataan di dalam negerinya. Akibatnya stok senjata di dalam negeri mereka menumpuk. Hal ini jika tidak diatasi bukan saja akan merugikan perusahaan-perusahaan senjata tersebut milyaran dolar, tetapi juga pada gilirannya akan merugikan negara yang bersangkutan karena pemasukan dari pajak, upah buruh dan lain-lain akan terhambat.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka negara-negara produsen senjata tersebut berlomba-lomba mencari pasaran baru di seluruh dunia, terutama di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin. Agar persenjataan tersebut dapat laku dijual, maka baik pihak swasta maupun pemerintah negara-negara itu melakukan berbagai cara, mulai dari pendekatan diplomasi, sistem imbal beli, diskon sampai dengan penggunaan "tekanan" (secara halus maupun secara kasar).

Rusia, misalnya, bersedia menjual persenjataannya kepada RRC dengan harga relatif jauh lebih murah dibandingkan harga senjata sejenis dari AS dan Eropa Barat. Termasuk di dalamnya adalah penjualan pesawat tempur Su-27, Mi-31, pembom Tu-22 Backfire, pesawat pengintai Il-76, misil darat ke udara, tank T-72 dan berbagai senjata lainnya. Rusia juga telah menawarkan kepada Malaysia untuk membeli antara 20-30 buah pesawat tempur MiG-29 dengan cara imbal beli dengan minyak kelapa sawit, tekstil dan barang-barang lainnya.

Sementara itu Indonesia di tawari rudal Scud dan pesawat tempur canggih jenis MiG-21, kapal selam, helikopter dan berbagai jenis senjata lainnya dengan harga yang juga relatif murah. Pada saat yang sama AS juga giat melobi pemerintah Indonesia, Thailand, Taiwan dan Pakistan untuk membeli persenjataan mereka, termasuk pesawat tempur canggih F-16.

Jadi di satu sisi ada kecenderungan dari negara-negara produsen senjata untuk menjadikan kawasan Asia sebagai pasar besar bagi produk persenjataan mereka, baik yang baru maupun yang bekas. Di sisi lain, dari pihak negara-negara di kawasan ada kecenderungan untuk melihat tawaran yang membanjir dan murah tersebut sebagai kesempatan untuk membeli persenjataan guna meningkatkan kemampuan militer mereka. Hal ini pada akhirnya menjadi salah satu faktor pendorong mengalirnya persenjataan ke negara-negara di kawasan.

Adanya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di negara-negara kawasan dalam proses pembelian senjata tersebut telah memperlancar masuknya senjata-senjata itu ke negara-negara kawasan. Peningkatan pembelian senjata oleh Thailand, misalnya, diyakini oleh para pengamat berkaitan erat dengan adanya korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat militer senior atau kunci di negeri itu. Menurut perkiraan para pejabat militer senior di negara tersebut mengutip uang komisi dari para produsen senjata sebesar 30 sampai 40 persen dari nilai kontrak setiap kali Thailand membeli senjata. Mengingat besarnya keuntungan pribadi yang dapat dikeruk dari pembelian senjata, maka masuk akal jika para pembuat keputusan militer di negara itu sangat antusias dalam membeli persenjataan.

Penutup

Dari seluruh data yang telah diuraikan dalam bagian awal tulisan ini tampak jelas bahwa perlombaan persenjataan di kawasan Asia Pasifik belum berhenti sampai sekarang, dan diperkirakan di masa depan hal tersebut akan terus berlangsung. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya negara-negara di kawasan Asia Pasifik belum berhasil melepaskan diri dari kungkungan pengaruh dilemma keamanan (*security dilemma*). Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan bahwa setiap pembangunan kekuatan militer oleh suatu negara akan dipandang oleh negara lain sebagai ancaman terhadapnya. Pandangan semacam itu pada gilirannya telah mendorong negara terakhir untuk meningkatkan pembangunan kekuatannya, dan begitu seterusnya. Hal ini pada akhirnya akan lingkaran aksi-reaksi yang tak berujung diantara negara-negara di kawasan. Akibatnya terjadi perlombaan senjata diantara negara-negara tersebut. Hal inilah tampaknya yang terjadi di kawasan Asia Pasifik dewasa ini.

Gejala semacam itu tentu saja sangat berbahaya bagi kestabilan kawasan secara keseluruhan. Hal ini sekali lagi berarti akan mendorong perlombaan senjata baru, bukan saja di kawasan Asia Pasifik tetapi juga bahkan di seluruh dunia. Masalahnya adalah, jika logika tersebut diikuti secara irasional, maka dalam jangka pendek ia akan menyeret negara-negara di kawasan kelembah pertikaian fisik atau perang. Apalagi jika diingat bahwa sebagian besar dari negara-negara yang sangat pesat pertumbuhan militernya umumnya terlibat dalam satu atau lebih konflik dengan negara-negara tetangganya.

Disamping itu, tindakan mengikuti logika semacam itu (ikut terjun dalam perlombaan senjata) akan menguras energi (sumber ekonomi, tenaga dan pikiran) dari negara-negara yang bersangkutan. Jika hal ini berlangsung terus tanpa terkendali dapat berakibat buruk bagi kemampuan ekonomi negara-negara tersebut, sebagaimana halnya terjadi pada Rusia dewasa ini.

Sebaliknya, jika negara-negara di kawasan kurang tanggap terhadap kecenderungan tersebut, maka dapat dipastikan akan terjadi ketidakseimbangan baru yang adapat mengancam stabilitas dan keamanan kawasan. Suatu negara yang tidak mampu mengikuti dinamika keseimbangan kekuatan tersebut, misalnya, bisa jadi akhirnya menjadi sasaran hegemoni atau dominasi negara yang lebih kuat sehingga negara tersebut akan kehilangan kepercayaan diri dan berada dalam kontrol negara lain.

Dengan demikian, mudah dipahami jika mayoritas negara-negara di berbagai kawasan terus berusaha untuk memiliki kekuatan militer yang tangguh. Dalam pandangan negara-negara tersebut, memiliki kekuatan militer yang tangguh merupakan hal yang esensial karena kekuatan militer sampai saat ini masih tetap merupakan faktor penting dalam hubungan internasional. Mereka tetap percaya bahwa kekuatan militer masih terus menjadi salah satu faktor penting dalam usaha perwujudan kepentingan nasional mereka di dunia.

Keseluruhan kecenderungan tersebut, langsung maupun tidak langsung, pasti akan dan telah mentransformasikan lingkungan strategis Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Keamanan masa depan Indonesia, sebagaimana kesejahteraan ekonomi, akan sangat ditentukan oleh kondisi strategis kawasan Asia Pasifik. Dalam keadaan tidak menentu tersebut, maka untuk menjaga keamanan Indonesia diperlukan antisipasi yang memadai. Dalam hal ini, di samping hubungan politik, ekonomi dan kebudayaan dengan negara-negara di kawasan, kemampuan militer yang efektif tetap penting bagi keamanan Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 45, pemerintah bertanggungjawab penuh terhadap keamanan dan pertahanan negara Indonesia. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah jaminan bahwa pemerintah harus dapat mencegah atau menghancurkan setiap serangan militer terhadap negara kita. Untuk maksud tersebut, kita harus memiliki kekuatan militer yang memadai serta kebijaksanaan yang mendukung usaha pertahanan dan keamanan tersebut.

Daftar Pustaka

- Ball, Desmond, "Trends in Military Acquisition: Implications for Security and Prospects for Constraints/Controls", dalam *The Making of A Security Community in the Asia Pasific*, Kuala Lumpur, ISI, 1994.
- Betts, Richard, *Conflict After The Cold War: Arguments on Causes of War and Peace*, Toronto: MacMillan Publishing, 1994.
- Buzan, Barry, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in The Post-Cold War Era*, Colorado: Lynne Rienner, 1991.
- Denoon, David, "Defence Spending in ASEAN: An Overview", dalam Chin Kin Wa (ed), *Defence Spending in South-East Asia*, Singapura: ISEAS, 1987.
- Fukuyama, Francis, "The End of History?", *The National Interest*, No. 16 (Summer 1989).
- Garnett, John, "The Role of Military power", dalam Richard Little and Michael Smith, *Perspective on World Politics*, Routledge, New York, 1991.
- Grimmett, Richard, *Conventional Arms Transfer to Third World 1984-1991*, Washington D.C.: Congressional Research Service, 1992.
- Harris, Geoffrey, "The Determinants of Defence Expenditure in the ASEAN Region", *Journal of Peace Research*, Vol. 23, No.1, March 1986.
- Japan Center for International Exchange, *Asia Pasific Security Invironment 1997*, Tokyo : JCIE, , 1998.
- Jervis, Robert, "The Spiral of International Insecurity", dalam Richard Little and Michael Smith, *Perspective on World Politics*, New York: Routledge, 1991.
- Lopez, George and Stohl, Michael (eds), *International Relations: Contemporary Theory and Practice*, Washington, D.C., CQ Press, 1989.
- Mack, Andrew, "Key Security Issues in The Asia Pasific," dalam Leaver, Richard and Richardson, James (eds), *The Post Cold War Order: Diagnoses and Prognoses*, Sydney: Allen and Unwin, 1993.
- SIPRI Yearbook, 1992: World Armaments and Disarmaments.

- Stoessinger, John, "The Anatomy of The Nation-State and The Nature of Power", dalam Richard Little and Michael Smith, *Perspective on World Politics*, New York: Routledge, 1991.
- US Joint Chiefs of Staff, *Joint Military Net Assessment 1992*, Washington, D.C.: US Joint Chiefs of Staff, August, 1992.
- Wanandi, Yusuf, *The Trend Toward Military Built-Up and Arms Proliferation in The Asia-Pacific Region*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1993.
- Ziegler, David, *War, Peace and International Politics*, London: Foresman and Company, 1990.